

Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Ppn (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan)

M. Reza Eka Putra¹⁾, Leriza Desitama Anggraini²⁾, Vhika Meiriasari³⁾

^{1), 2), 3)} Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

Email: Mrezaekaputra1306@gmail.com¹⁾, leriza@uigm.ac.id²⁾, vhikams@uigm.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research aims to determine and test the influence of accountability and transparency on taxpayers' trust in VAT collection at the Public Works Department of Highways and Spatial Planning, South Sumatra Province. The research methods used were to study a specific population or sample and to collect data and to analyse quantitative data. The target population studied was 40 partners of the Public Works Department of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province. The sampling technique that was used was non-probability sampling. This research was analyzed using SPSS, which aims to examine the influence of accountable and transparent on taxpayers' trust in VAT collection at the Public Works Department of Highways and Spatial Planning of South Sumatra Province. The results of this research show that the accountability variable (X1) partially has a positive and significant effect on taxpayer trust (Y), so H1 is accepted from the calculated t results to be greater than tTable, namely $4,620 > 1,996$ and the significance value (Sig.) is $0.000 < 0.05$. Then, the results of the transparency test (X2) partially have a significant effect on taxpayer confidence (Y), so H2 is accepted because tcount is greater than ttable, namely $4,314 > 1,996$ and the significance value (Sig.) is $0.000 < 0.05$. The results of the F test show that Fcount is greater than Ftable, namely $226,864 > 3.13$ and a significant value of $0.000 < 0.05$, so it can be concluded that accountability (X1) and transparency (X2) simultaneously have a significant influence on tax compliance (Y), so H3 is accepted.

Keywords: *Accountability, Transparency, Taxpayer Trust*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dalam Pemungutan PPN pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan mengumpulkan data serta menganalisis data kuantitatif. Populasi sasaran yang diteliti adalah 40 mitra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling. Penelitian ini dianalisis menggunakan SPSS yang bertujuan untuk menguji pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dalam Pemungutan PPN pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak (Y) maka H1 diterima dari hasil t hitung lebih besar daripada tTabel yaitu $4.620 > 1.996$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0.000 < 0.05$. Kemudian Hasil pengujian Transparansi (X2) secara parsial memberikan pengaruh dan signifikan terhadap Kepercayaan wajib pajak (Y) maka H2 diterima Karena t hitung lebih besar daripada ttabel yaitu $4.314 > 1.996$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0.000 < 0.05$. Hasil ujiF menunjukkan Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu $226.864 > 3.13$ dan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y) maka H3 diterima.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Kepercayaan Wajib Pajak*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan Pembangunan Nasional. Indonesia juga sebagai negara dengan kas penerimaan terbesar berasal dari pajak. Menurut mekanisme pemungutannya, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Alfian, 2018).

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur nasional Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang berperan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bersama instalasi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset konstruksi dalam pengerjaan yang berada di dinas ini

wajib dilaporkan berdasarkan peraturan yang telah. transparansi dalam pemungutan PPN di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Maka perhitungan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan PPN (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan)".

2. Landasan Teori

2.1 *Theory of Planned Behavior* sebagai Teori Umum (*Grand Theory*)

Berdasarkan model TPB (*Theory of Planned Behavior*) menurut Ajzen (1988) dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku tidak patuh tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :

a) *Behavioral believe*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

b) *Normative believe*, yaitu keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut atau merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan normatif adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut.

c) *Control believe*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

2.3 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) bahwa ada beberapa fungsi pajak, yakni sebagai berikut:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetir*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai Pembangunan

2.4 Penggolongan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) bahwa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Nottingham. Terjemahan J.P. Mayer dan B.S. Turner. 1998. *The Consumer Society: Myths and*

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo, 2018) Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas:

1. *Official Assesment System.*

2. *Self Assesment System,*

3. *Withholding System*

2.6 Akuntabilitas dan Transparansi dalam permasalahan terkait Perpajakan

Dalam Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal Sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, BPK RI dibentuk sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri hanya untuk melakukan satu mandat saja, yaitu untuk memeriksa setiap sen uang yang dipungut. BPK RI tidak dapat melaksanakan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara termasuk pajak dan tidak dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan pajak yang benar dan utuh kepada rakyat melalui DPR untuk melaksanakan hak budgetnya. Menurut Hadjon, Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) UU KUP telah membatasi wewenang BPK sebagaimana diberikan Pasal 9 UU BPK. "Dalam Pasal 9 Ayat (1) UU BPK dikatakan BPK berwenang menentukan obyek pemeriksaan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b UU KUP Penjelasannya berpotensi menghambat proses reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.7 Kepercayaan Mempengaruhi Wajib Pajak

Hubungan kepercayaan melibatkan transaksi dimana pihak yang dipercaya (*truster*) menghadapi resiko kehilangan jika pihak yang mempercayai (*trustee*) tidak sesuai dengan harapan dan kehilangan beberapa kesempatan jika transaksi tersebut berlangsung tanpa kepercayaan (Scholz, 1998). Kepercayaan memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan kesediaannya atau kesukaralelaan untuk memberikan mereka lebih lagi. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah adalah musuh dari modal sosial. Secara keseluruhan berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan

mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya karena kepercayaan seseorang mewakili informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan tentang dunia sekeliling mereka (Desitama Anggraini et al., 2023).

2.8 Hipotesis Penelitian

Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

H2 = Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

H3 = Akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh secara langsung

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan melakukan pengumpulan data serta menganalisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji suatu hipotesis.

3.1 Data

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah 40 rekanan di Dinas PU Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling*.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Ahyar et al., 2020).

3.2.2 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda

3.2.3 Uji Instrument

3.2.3.1 Uji Validitas

Validitas menilai seberapa akurat alat ukur yang digunakan, sedangkan reliabilitas menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut.

3.1 Data

Bagian ini merupakan subbagian dari metodologi yang berfungsi untuk menyajikan jenis data yang Anda gunakan dan bagaimana Anda mengumpulkannya.

3.2 Metode Analisis

Bagian ini merupakan subbagian dari metodologi yang berfungsi untuk menjelaskan metode analisis yang Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda.

3.2.3.2 Uji Reliabilitas

Sedangkan reliabilitas menilai konsistensi metode ukur, artinya apabila terdapat hasil yang serupa dapat dikatakan konsisten jika menggunakan metode atau cara yang serupa dalam kondisi yang sama.

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

3.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependent dan variabel independent memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai kolmogorov smirnov $> 0,05$.

3.2.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang tinggi antar variabel dependen dan variabel independent. Jika suatu variabel independent nilai VIF lebih dari maka terjadi kolonieritas yang kuat antar variabel independent. Dalam menguji Multikolinieritas peneliti akan menggunakan uji glejser dengan pengelolaan data menggunakan SPSS (Ahyar et al., 2020).

3.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

3.2.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur variasi variabel pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. apabila nilai (R²) semakin mendekati angka 0 artinya maka semakin kecil kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.2.6 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect (Munandar, 2017)

3.2.7 Uji T

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial, nilai t dalam regresi linier

berganda digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas

4.2 Uji Validitas

Variabel	No. Item	R.	Variabel	No. Item
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0.854	0.235	Valid
	X1.2	0.882	0.235	Valid
	X1.3	0.869	0.235	Valid
	X1.4	0.865	0.235	Valid
	X1.5	0.900	0.235	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0.835	0.235	Valid
	X2.2	0.892	0.235	Valid
	X2.3	0.901	0.235	Valid
	X2.4	0.892	0.235	Valid
	X2.5	0.860	0.235	Valid
Kepercayaan Wajib Pajak	Y1	0.865	0.235	Valid
	Y2	0.866	0.235	Valid
	Y3	0.919	0.235	Valid
	Y4	0.877	0.235	Valid
	Y5	0.816	0.235	Valid

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean
Akuntabilitas	70	7	25	21.07
Transparansi	70	7	25	21.17
Kepercayaan Wajib Pajak	70	7	25	21.24
Valid N (listwise)	70			

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Hasil pengujian uji deskriptif dengan sampel 7 penelitian menunjukkan bahwa nilai minimum (terendah) Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepercayaan Wajib Pajak adalah sebesar 7. Nilai maksimum (tertinggi) sebesar 25.

1. Akuntabilitas dengan nilai rata-rata (mean) 21.07 dan nilai standar deviasi sebesar 4.20. Jika dilihat dari nilai standar deviasi lebih kecil atau kurang dari nilai rata-rata (mean) yang berarti bahwa Akuntabilitas memiliki data sebaran yang merata.

2. Transparansi dengan nilai rata-rata (mean) 21.17 dan nilai standar deviasi sebesar 4.20. Jika dilihat dari nilai standar deviasi lebih kecil atau kurang dari nilai rata-rata (mean) yang berarti bahwa Transparansi memiliki data sebaran yang merata.

3. Kepercayaan Wajib Pajak dengan nilai rata-rata (mean) 21.24 dan nilai standar deviasi sebesar 4.07. Jika dilihat dari nilai standar deviasi lebih kecil atau kurang dari nilai rata-rata (mean) yang berarti bahwa Kepercayaan Wajib Pajak memiliki data sebaran yang merata.

4.2 Hasil Uji Instrument

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh item Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepercayaan Wajib Pajak dinyatakan valid, karena koefisien yang dihasilkan lebih besar dari 0.235. Sehingga tidak perlu mengganti atau menghapus pernyataan.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Akuntabilitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.923	5

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Transparansi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.924	5

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Kepercayaan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.918	5

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepercayaan Wajib Pajak pernyataan mempunyai nilai yang bisa dikategorikan reliabilitas adalah dapat diterima karena lebih besar dari nilai cronbach*c alpha 0,6.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45984276
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.066
	Negative	-.078
	Mean	.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{a,b}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. membuktikan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Output SPSS Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
		Sig.
Model		
1	(Constant)	.019
	Akuntabilitas	.111
	Transparansi	.093

a. Dependent Variable: ABS Res

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Berdasarkan output spss diatas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk semua variabel diatas dari 0.05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Output SPSS Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	.168	5.946
	Transparansi	.168	5.946

a. Dependent Variable: Kepercayaan Wajib Pajak

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Dari output diatas nilai VIF untuk semua variabel kurang dari 10.00 dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.715	.934
	Akuntabilitas	.478	.103
	Transparansi	.447	.104

a. Dependent Variable: Kepercayaan Wajib Pajak

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$Y = 1.715 + 0.478 X_1 + 0.447 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai a = 1.715 menunjukkan bahwa jika nilai X1 dan X2 tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai konstanta Y sebesar 1.715.

2. Nilai b1 = 0.478 menyatakan jika X1 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.478 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X2.

3. Nilai b2 = 0.447 menyatakan jika X2 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.447 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X1.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji T Partial

Tabel 4.10 Uji T Partial

Coefficients ^a			
		T	Sig.
Model			
1	(Constant)	1.836	.071
	Akuntabilitas	4.620	.000
	Transparansi	4.314	.000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Wajib Pajak

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Nilai Akuntabilitas (X1) thitung sebesar 4.620, dan diperoleh tTabel 1.996. Karena thitung lebih besar daripada tTabel yaitu 4.620 > 1.996 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.000 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Selanjutnya nilai variabel Transparansi (X2) thitung sebesar 4.314, dan tTabel 1.996. Karena thitung lebih besar daripada tTabel yaitu 4.314 > 1.996 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.000 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

4.5.2 Hasil Uji F Simultan

Tabel 4.11 Uji F Simultan

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regressi on	226.864	.000
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kepercayaan Wajib Pajak

b. Predictors : (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel output spss diperoleh Fhitung sebesar 226.864 dan Ftabel. Tabel distribusi F maka diperoleh F tabel 3.13 (dapat dilihat di distribus ftabel). Dapat disimpulkan jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu 226.864 > 3.13 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak.

4.6 Hasil Uji Kolerasi

4.6.1 Hasil Uji Koefisien Kolerasi

Tabel 4.12 Uji Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 ^a	.871	.867	1.481
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Menunjukkan bahwa antara variabel Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) dan Kepercayaan Wajib Pajak (Y) terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0.933. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat korelasi positif antara antara kedua variabel dengan tingkat hubungan sangat kuat.

4.6.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 ^a	.871	.867	1.481
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				

Sumber: SPSS, data diolah (2023)

Diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0.871 atau $0.871 \times 100 = 87.1\%$ yang memiliki pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar 87.1% dan selebihnya 12.9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak peneliti teliti.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, karena thitung lebih besar daripada tTabel yaitu $4.620 > 1.996$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau yang signifikan antara Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Wajib Pajak. Hasil data pun menguatkan bahwa semakin baik akuntabilitas dalam pemungutan PPN, maka akan semakin baik dan terjadinya peningkatan terhadap kepercayaan wajib pajak. Hasil data empiris yang dihasilkan menguatkan teori kepercayaan yang dikemukakan oleh John T. Scholzt dan Mark Lubell bahwa akuntabilitas terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Ini juga dibuktikan dengan data primer yang diperoleh dari hasil pengujian statistik yang menghasilkan data yang

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, Karena thitung lebih besar daripada tTabel yaitu $4.314 > 1.996$ dan nilai signifikansi (Sig.) $0.000 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak. Hasil data empiris yang dihasilkan menguatkan teori transparansi yang dikemukakan oleh John T. Scholzt dan Mark Lubell bahwa transparansi terhadap pemungutan PPN dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Ini juga dibuktikan dengan data primer yang diperoleh dari hasil pengujian statistik yang menghasilkan data yang berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak.

Dan juga selaras dengan salah satu *Theory of Planned Behavior* yaitu *Normative Believe* dimana keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut atau merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan normatif adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut.

4.7.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel yaitu $226.864 > 3.13$ dan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Wajib Pajak. Akuntabilitas dan transparansi memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemungutan PPN. Semakin baik akuntabilitas dan transparansi nya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan wajib pajak.

Teori tindakan beralasan atau dikenal dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (to the point) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. *Normative believe*, dan selaras dengan *Control believe*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (X1) secara parsial memberikan pengaruh dan signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak (Y). Maka H1 diterima.
2. Transparansi (X2) secara parsial memberikan pengaruh dan signifikan terhadap Kepercayaan wajib pajak (Y). Maka H2 diterima.
3. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Maka H3 diterima.

Daftar Pustaka

- Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. 1–95.
- Defiyanti. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Graphika Global Dinamika. 1–58.
- Desitama Anggraini, L., Hendarmin, R., & Auren Defsari, B. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- Devi, P. (2017). Kuesioner : Pengaruh Transparansi Dalam Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Norma Ekspektasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten).
- Devitasari, G. A. (2021). Kuesioner : Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara).
- Dewi, N. P. D. A. (2020). Kuesioner : Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Dewi, S. R. T. (2022). Analisis Dampak PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Bali. 1–53.
- Fatriana, W. (2021). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya. 1–78.
- Fitriani. (2018). Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Karya Mandala Putera. 1–52.
- Hasibuan, Z. A. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat. 1–62.
- Hutami, F. L. (2022). Kuesioner : Determinan Perencanaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajibpajak Badan Perusahaan Farmasi Di Kota Semarang).
- Jesni, Konde, T. Y., & Setiawati, L. (2022). Kuesioner : Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mahessa, C. P. (2018). Kuesioner : Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Saksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating.
- Mardiasmo. (2019). Mardiasmo 2019.
- Marsha, N. V. (2021). Kuesioner : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jakarta Timur).
- Meiriasari, V., Khosakiyah, E., & Utari Putri, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(1).
- Muhtazar. (2020). Muhtazar 2020.
- Nugroho, R. (2022). Kuesioner : Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening.
- Nurainun. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Pertani Medan. 1–56.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 12(2), 167–178.
- Pramudya, A. R. (2015). Kuesioner : Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik, Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Gunungkidul).
- Puspasari, A. (2019). Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. 17(2).
- Rachman, S. (2020). Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket pada PT. POS INDONESIA (Persero) Makassar 90000. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 2714–6294.
- Rahma, M., Singaperbangsa, U., Program, K., Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Rohmadani, Z. Y. (2021). Kuesioner : Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E- Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Semarang).
- Rusdiati, S. (2018). Kuesioner : Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Peraturan Perpajakan , Transparansi lam Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus da Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Purwokerto).

- Safitri, E. (2023). Kuesioner : Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan E-Filling sebagai Variabel Moderasi.
- Saputra, D. B. (2021). Kuesioner : Pengaruh Persepsi Tentang Petugas Pajak, Sistem Administrasi, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Dan Hukum Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Jakarta Selatan).
- Saputra, E. (2018). Kuesioner : Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan Akuntabilitas dan Batasan Waktu Pemeriksaan Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta.
- Sari, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. 1–17.
- Setiyanningrum, I. (2017). Kuesioner : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money pada BUMD di Yogyakarta.
- Sinaga, K. E., Thoha, I., & Eliza. (2021). Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Masa Pandemi COVID-19 Pada PT. SMART. 1–74.
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Risma, 2(1), 1–19.
- Stevanny, E. F. (2020). Kuesioner : Pengaruh Persepsi Atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Aspal Nusantara. 290–300.
- Syahrir, M. I. (2015). Mekanisme Penyelenggaraan Pelaporan PPN dan PPnBM pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. 1–69.
- Wahyuni, M. (2023). Analisis Selisih Perhitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus Koperasi Karyawan Tambang Emas Pongkor. 1–83.
- Walardi, S. (2019). Mekanisme Pemungutan dan perhitungan terhadap pajak petambahan nilai (PPN) atas barang kena pajak pada PT. BINA CITRA KHARISMA LESTARI (OXA). 13–81.
- Winarsih, E. (2023). Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Maksimum. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436–442. <http://www.pajak.go.id>
- Wiranti, S. (2022). Kuesioner : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang.
- Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(2), 977–985.